

INSTITUSIONALISASI PARTAI GOLONGAN KARYA PASCA REFORMASI

Ignasius Usboko¹

usbokoignasius@gmail.com

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

ABSTRAK

Konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur diindikasikan oleh kinerja ekonomi dan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil – militer dan pelembagaan partai politik. Pelembagaan partai ini menjadi penting dikaji terutama bagaimana derajat kesisteman khusus pengambilan keputusan dan pengetahuan publik khusus ruang dukungan partai Golkar. Tujuan kajian adalah mengetahui pengambilan keputusan terhadap calon pemimpin dan pemetaan ruang dukungan partai Golkar. Penyusun mengkaji menggunakan metode studi pustaka.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelembagaan partai Golkar dalam hal pengambilan keputusan dimana adanya pendasaran konstitusi partai Golkar meskipun tidak cukup mempertimbangkan usulan dewan pimpinan daerah menyangkut calon gubernur dan pemetaan ruang dukungan dimana persebaran dukungan cukup signifikan pada 11 kabupaten/kota dari 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Hal ini berarti partai Golkar eksis dan terlembaga dengan cukup baik. Saran bahwa Partai Golkar perlu secara konsisten menaati konstitusi Partai dengan mempertimbangkan usulan calon pemimpin secara baik sehingga ada dukungan maksimal seluruh anggota partai dan ruang dukungan yang ada perlu dimaksimalkan melalui pelaksanaan program partai secara continue dan memperluas ruang dukungan ke 11 kabupaten lain secara cukup signifikan agar eksis pada tiap pemilu.

Kata Kunci : Partai Golongan Karya, Pelembagaan Partai Politik.

ABSTRACT

The consolidation of democracy in Indonesia, including in the East Nusa Tenggara Region is indicated by economic and political performance in the democratic regime, civil-military relations and institutionalization political parties. It is important to study the institutionalization of this party especially the degree of systematic decision-making and public knowledge specifically regarding the Golkar Party's support space. The aim of the study is to understand the decision making of potential leaders and map the support space for the Golkar Party. The Author studied using the literature study method.

The result of the study shows that the institutionalization of Golkar Party in terms of decision making is based on the Golkar Party constitution, although it does not sufficiently consider the regional leadership council's proposals regarding gubernatorial candidates and the mapping of the support space where the distribution of support is quite significant in 11 regencies/cities out of 22 regencies/cities in East Nusa Tenggara. This means that the Golkar Party exists and is well institutionalized. Suggestion that the Golkar Party needs to consistently comply with the Party constitution by carefully considering the proposals leadership candidates so that there is maximum support from all party members and the existing support space needs to be maximized through continuous implementation of party programs and the expanding support space to 11 other districts significantly enough to exist at every election.

Keywords : Golongan Karya Party, Political of Parties institutionalization.

PENDAHULUAN

Partai Golongan Karya sebagai institusi politik pengemban hakikat tatanan baru, yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral, serta semangat pembangunan terus menerus dalam meningkatkan karya dan kekaryaannya di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana pembukaan AD Partai Golkar. Partai Golkar merupakan kelanjutan Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pasal 2 AD Partai Golkar).

Partai Golongan Karya merupakan sebuah partai kader yang diperkenalkan pada tahun 1983 di era kepemimpinan Sudharmono. Adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi modern, dengan sistem keanggotaan partai diubah menjadi stelsel aktif. Menjadi anggota partai, orang harus pro aktif mendaftar secara resmi. Hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya, anggota organisasi-organisasi yang mendirikan dan berafiliasi ke partai Golkar dianggap otomatis sebagai anggota partai Golkar.

Partai Golkar menjadi partai hegemonik pada 1971-1998, pola penugasan kader serta rekrutmen jabatan-jabatan politik sangat ditentukan oleh mekanisme tiga jalur yaitu Ketua Dewan Pembina, Menteri Dalam Negeri dan Panglima ABRI. Sejak reformasi tahun 1998, partai Golkar tidak lagi menjadi partai hegemonik dan posisi partai Golkar harus berorientasi pada pasar bukan lagi berorientasi pada kekuasaan. Partai Golkar melakukan

perubahan dan penyesuaian, baik yang berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang tidak lagi tergantung dari ketua dewan pembina dan tiga jalur melainkan melalui forum-forum pengambilan keputusan partai yaitu Munas, Rapim atau Rapat Pleno.

Bertolak dari sistem internal partai terutama yang berkaitan dengan sistem pengkaderan dan rekrutmen jabatan politik maka Partai Golkar menjadi eksis dan menjadi satu-satunya Partai pembentuk pemerintahan melalui kemenangannya pada pemilu selama orde baru. Selanjutnya Partai Golkar mampu menghadapi pergolakan politik pada masa transisi dari orde baru menuju orde reformasi. Akbar Tanjung dalam Disertasi tentang Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi Antara Tantangan dan Respon, mengatakan Partai Golkar mampu bertahan hidup (*survive*), mampu meraih dukungan suara dan berperan ketika terjadi transisi politik menuju demokrasi (reformasi). Bahkan pada pemilu 2004 Partai Golkar mampu menjadi pemenang pemilu, akan tetapi pada pemilu 2009 Partai Golkar menempati posisi kedua setelah Partai Demokrat sebagai pemenangnya. Pada pemilu 2014, partai Golkar menempati urutan kedua setelah PDIP pada posisi pertama. Pada pemilu 2019, Partai Golkar menempati urutan kedua setelah PDIP.

Mencermati hasil pemilu seperti diatas menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar bersifat fluktuatif. Artinya Partai Golkar kemudian tidak memiliki dukungan masyarakat secara konsisten sebagaimana pada pemilu-pemilu selama orde baru. Partai Golkar dalam perolehan suara secara lokal juga mengalami kondisi yang hampir sama yakni adanya fluktuasi dukungan

masyarakat dimana pemilu 2004, 2009 dan 2014, Partai Golkar menempati posisi pertama menyusul PDIP dan Partai Demokrat. Pada Pemilu 2019, Partai tergeser ke posisi kedua setelah PDIP.

Hal lain yang penting untuk dikaji adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar masih dominan dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini terlihat pada pencalonan kepala daerah yaitu penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2013/2018. Penetapan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut menuai polemik bahwasannya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak menyetujui keputusan DPP tersebut pasalnya DPP tidak memertimbangkan aspirasi DPD. Melki Lakalena yang ditetapkan sebagai calon wakil gubernur adalah calon yang tidak populer dan tidak berpengalaman, sehingga hal ini akan mempengaruhi dukungan masyarakat untuk mengangkat partai Golkar sebagai pemenang pada pilgub NTT periode 2013-2018. Akan tetapi DPP berdalih bahwa keputusannya telah berdasarkan pertimbangan penting bahwa kader muda sudah saatnya untuk dicalonkan Partai Golkar. Maka mau tidak mau keputusan DPP dapat dipatuhi oleh hierarki bawah termasuk DPD Partai Golkar Propinsi NTT.

Mencermati fenomena tersebut diatas maka secara organisatoris Partai Golkar yang meraih dukungan besar dan menang dalam pemilu serta tetap menjadi partai kepercayaan masyarakat atau tidak ditentukan oleh beberapa faktor termasuk faktor derajat pelembagaan/ institusionalisasi partai politik. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena

adanya persoalan yang masih “eksis” di tubuh partai yang berkiprah sejak tahun 1964, partai yang juga karena umurnya dikatakan terlembagakan seperti yang dikatakan Huntington, ternyata mengalami fluktuasi perolehan dukungan suara pemilu.

Kajian pemikiran ini berfokus pada bagaimana derajat pengambilan keputusan partai politik oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan bagaimana pemetaan dukungan masyarakat terhadap partai politik secara stabil?

Samuel P. Huntington (1983) menyatakan pelembagaan atau institusionalisasi partai adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu.

Following Mainwaring (1999: 22–39) and Mainwaring and Scully (1995), we conceptualize four dimensions of party system institutionalization. First, more institutionalized systems manifest considerable stability in patterns of party competition (Przeworski, 1975). This is the easiest dimension of institutionalization to measure, and perhaps the most important because institutionalization is conceptually very closely linked to stability. Second, in more institutionalized systems, parties have strong roots in society and most voters, conversely, have strong attachments to parties. Third, in more institutionalized systems, political actors accord legitimacy to parties. Third, in more institutionalized systems, political actors accord legitimacy to parties.

Pelembagaan partai merujuk pada empat dimensi sistem institusionalisasi partai yang dikembangkan Scott Mainwaring dan Timothy R. Scully (1995) yang dimuat dalam Hand Book Mainwaring and Torcal dapat

dijelaskan : Pertama, stabilitas kompetisi partai. Kompetisi partai yang tidak disertai institusionalisasi akan mempertinggi angka *volatility* dalam pemilu. Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai ideologi yang mengikat. Akar partai dalam masyarakat ditentukan oleh program dan ideologi yang jelas dan dapat diterima masyarakat serta menyangkut hubungan antara partai dan pemilihnya. Lemahnya hubungan ideologi antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang memperlemah pengakaran partai di masyarakat. Ketiga, adanya legitimasi aktor-aktor politik terhadap partai. Mereka melihat partai sebagai sebah bagian yang penting dalam demokrasi. Keempat, partai dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian bukan merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya. Proses pelembagaan partai akan sangat dibatasi selama partai masih menjadi instrumen personal dari pemimpinnya.

Sedangkan pelembagaan partai menurut Vicky Randall dan Lars Svason (2002) adalah :

Proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (*the process by wich the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture*). Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan dihasilkan sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (*systemnes*) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil

persilangan aspek eksternal dan struktural. (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Tabel 1 : Persilangan Dimensi Kepartaian

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi Keputusan
Kultural	Identitas Nilai	Citra pada Publik

Sumber: Randall dan Svason (2002)

Institusionalisasi atau pelembagaan partai akan ditentukan oleh profesionalisme dan pengelolaan partai. Tidak hanya ketika menjelang pemilu, tetapi juga menyangkut rutinitas kegiatan partai. Pengelolaan dan profesionalisme tersebut terdiri dari beberapa aspek penting kehidupan partai. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan ideologi dan kebijakan, aturan main, kekuasaan dan latar belakang sosial anggota partai dan pemimpinnya, rekrutmen dan kandidat yang duduk di legislatif, serta proses marketing dari partai tersebut. Keprofesionalan dari para staf partai yang menjalankan fungsinya sehari-hari menjadi elemen penting dalam pelaksanaan aspek-aspek di atas.

Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih terus berlangsung hingga pelaksanaan pemilu tahun 2019 dimana sistem politik demokrasi terus menghendaki peran penting partai politik dalam mewujudkan tujuan negara dan secara kolaboratif menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi. Peran partai politik makin nyata ketika demokratisasi semakin meluas di Negara-negara berkembang antara tahun

1970-1990-an. Samuel P. Huntington menyebut periode tersebut sebagai “Gelombang Ketiga Demokrasi”. Indonesia baru mencatatkan kembali sebagai Negara demokrasi ketika melakukan reformasi pada 1998, (Tanjung 2007 : 1-2). Memaknai pendapat tersebut bahwa partai politik yang tumbuh dalam sistem politik demokrasi sering diterima tanpa kritik (tanpa *reserve*) atau bahkan sudah dianggap lumrah kebenarannya (*taken for granted*). Sejatinya partai politik hadir untuk menghidupi sistem politik – menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat melalui kepemimpinan politik yang dibentuknya.

Perspektif Larry Diamond (1999) bahwa konsolidasi demokrasi mencakup pencapaian tiga agenda besar yaitu : 1) kinerja atau performance ekonomi dan politik dari rejim demokratis, 2) institusionalisasi politik (penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal dan penegakan hukum), dan 3) restrukturisasi hubungan sipil – militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer disatu pihak dan terbentuknya *civil society* yang otonom dipihak lain. Konteks kajian ini , penyusun berfokus pada point 2 menyangkut institusionalisasi partai politik dengan asumsi 1) dalam konteks substansi, partai politik menjadi jantung demokrasi, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu, kalau “jantungnya sehat” maka demokrasi akan terkonsolidasikan dengan baik dan produktif; 2) dalam konteks efisiensi, perlu sedapatnya mengkaji tentang institusionalisasi partai politik, dalam hal ini Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

Kajian atas permasalahan dengan menggunakan teori pelebagaan partai politik

diatas mengusung tujuan yaitu : 1) mengetahui pengambilan keputusan terhadap calon pemimpin; 2). pemetaan ruang dukungan partai Golkar.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan dimaksud bahwa penyusun mempelajari dan memahami konsep atau teori melalui 4 tahap yaitu menyiapkan perangkat, bibliografi, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan kajian, Zed (2004) dikutip oleh Adlini dkk (2021). Rangkaian kegiatan ini terutama pembacaan atau pencatatan bahan kajian dinyatakan dengan pengumpulan data terhadap sumber sekunder berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan, Mendes, Wohlin, Felizardo & Kalinowski (2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Derajat Pelebagaan Partai Politik

1. Derajat Kesisteman

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa derajat kesisteman berhubungan dengan pelaksanaan prosedur atau tatacara pengambilan keputusan strategis partai politik yang mandiri dan hubungan partai politik dengan masyarakat. Maka beberapa hal dapat dilihat untuk analisis tentang partai golongan karya. Hal-hal tersebut adalah sejarah pembentukan partai golongan karya, penentu pengambilan keputusan partai, dan hubungan partai dengan masyarakat. Namun kebutuhan akan analisis derajat kesisteman hanya pada penentu pengambilan keputusan dan hubungan partai dengan masyarakat.

Partai Golongan Karya merupakan Partai lama dan modern yang eksis hingga saat ini. Perannya telah membuktikan eksistensinya dalam perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia. Meski kiprahnya pada masa orde baru yang disebut sebagai golongan karya bukan merupakan partai politik memberi andil besar dalam perpolitikan dan pemerintahan. Karena itu sistem internal kurang demokratis yang diindikasikan oleh dominasi pimpinan puncak dan pihak eksternal dalam pengelolaan partai termasuk pengambilan keputusan strategis seperti penentuan calon pejabat publik atau pemimpin publik. Perkataan lain bahwa AD/ART partai didesain sedemikian rupa yang memungkinkan adanya dominasi tersebut. Penentu keputusan partai adalah Dewan Pembina Partai, Mendagri dan Panglima ABRI. Lantas anggota partai secara keseluruhan tidak mendapat hak dalam pengambilan keputusan strategis tersebut.

Akbar Tanjung (2007) dalam Disertasi tentang Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi antara Tantangan dan Respon, mengatakan Partai Golkar pada masa transisi politik mampu bertahan (*survive*), mengikuti pemilu pertama pada era reformasi bahkan mampu untuk *survive* juga karena Partai Golkar dapat mendayagunakan kelembagaannya. Selain itu, dapat juga melakukan munas luar biasa untuk mengganti pimpinan pusat sekaligus mengubah AD/ART tentang sistem pengambilan keputusan Partai Golkar.

Keberhasilan partai Golkar untuk bertahan dalam transisi demokrasi dari rezim otoriter orde baru ke orde reformasi, dan keberhasilannya bertransformasi menjadi sebuah partai politik demokratis salah

satunya, menurut analisa penulis merupakan salah satu bukti bahwa Golkar telah terlembaga cukup baik.

Hal ini dapat terlihat dari aspek Systemness, yang dipahami sebagai *the increasing scope, density and regularity of the interactions that constitute the party as a structure. Regularity implies a degree of routinization, and the development of prevalent conventions guiding behaviour*, Randall dan Svasand, (2002), dimana Partai Golkar sudah merombak total organisasinya pasca reformasi agar sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, yang menjadi pijakan dasar dari Partai Golkar dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi.

Systemness ini juga dilihat dari organizational development that has typically been understood in terms of the elaboration of a formalized structure and the building of mass membership, Randall and Svasand (2002), yang juga bisa dilihat dalam structural dan keanggotaan Partai Golkar yang secara legal ditetapkan melalui munaslub, serta keanggotaan yang luas melalui organisasi-organisasi sayap partai yang berasal dari berbagai kalangan.

Meski Partai Golkar telah melakukan penyesuaian terhadap AD/ART agar demokratis sebagaimana tertuang dalam Pembukaan AD/ART Partai Golkar yaitu Golongan Karya melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik pada Rapat Pimpinan Paripurna Golongan Karya tanggal 19 Oktober 1998 dan di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999, dengan nama Partai Golongan Karya. Dengan perubahan tersebut, Partai Golongan Karya sepenuhnya mengemban hakikat partai politik sebagai pilar demokrasi

dan kekuatan politik rakyat untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas, dan demokratis.

Selanjutnya Partai Golkar juga melakukan perubahan tentang kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan yaitu Pasal 4 yang menentukan kedaulatan Partai Golkar ada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Pasal 36 menentukan pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bila meninjau Partai Golkar pada pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013-2018, dikatakan tidak mematuhi ketentuan AD/ART Partai Golkar sehingga Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Propinsi NTT tidak bekerja maksimal untuk meloloskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT asal Partai Golkar.

2. Derajat Pengetahuan Publik atau Citra Publik (Reification)

Derajat pengetahuan publik dapat dilihat tentang dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar. Semakin besar dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar maka semakin baik pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap ideologi/platform, program kerja Partai Golkar. Partai Golkar dalam kiprahnya pada pemilu-pemilu di orde baru menunjukkan dukungan masyarakat yang besar, partai Golkar menang pada pemilu-pemilu era orde baru. Bahkan pada pemilu di era reformasi masih menunjukkan dukungan masyarakat yang besar meski tidak selalu menang pemilu. Pada pemilu 1999, Partai

Golkar menempati posisi kedua setelah PDIP, pada pemilu 2004, Partai Golkar menang pemilu dan pada pemilu 2009, Partai Golkar kembali menempati posisi kedua setelah Partai Demokrat.

Sementara dari aspek reification (Randall dan Svasand, 2002), yang dilihat sebagai the extent to which the party's existence is established in the public imagination, Partai Golkar juga sudah memilikinya, khususnya dikalangan pegawai negeri sipil dan keluarga militer, bahwa mereka sudah sepatutnya sebagai abdi negara memilih Golkar dalam setiap pemilu. Hal ini dapat terjadi karena penanaman dan doktrin yang cukup lama hingga berpuluh tahun yang dilakukan oleh Orde Baru, sehingga sulit untuk menghilangkan doktrin-doktrin yang sudah tertanam tersebut.

Kemudian salah satu aspek yang membuat Partai Golkar sebagai partai yang terlembagakan adalah, Golkar merupakan salah satu partai yang sangat stabil, untuk hadir dalam setiap pemilihan umum di Indonesia pasca reformasi dan mendapatkan suara selalu lebih dari 15%. Meskipun pasca runtuhnya Orde Baru, raihan suara partai Golkar yang pada awalnya selalu diatas 50% dan bisa dikatakan turun drastic, namun konsistensinya dalam setiap pemilu membuat Partai Golkar bertahan.

Mencermati gerak dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar mulai dari pemilu 1999 hingga pemilu 2009, maka mengalami kondisi tidak stabil/adanya fluktuasi baik secara nasional maupun lokal meski penurunannya tidak begitu signifikan. Tetapi tentu ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang dilihat disini adalah faktor ruang dukungan utama sebagaimana yang

dikehendaki Huntington tentang pelembagaan partai politik. Huntington megatakan bahwa kestabilan dukungan masyarakat terhadap partai politik perlu dilakukan pemetaan ruang untuk dukungan utama bagi partai politik. Bersandar pada pendapat demikian sebenarnya Partai Golkar memiliki ruang dukungan utama di Propinsi NTT terutama di beberapa kabupaten. Namun belum diikuti dengan upaya untuk mengawalinya, seperti program partai belum dilakukan secara kuntinue, program partai hanya dilakukan pada pelaksanaan pemilu. Maka masyarakat pula kurang begitu menjaga dukungannya terhadap Partai Golkar sebagaimana tergambar pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 : Hasil Pemilu Nasional Tahun 1999-2019

No	Pemilu	Hasil Pemilu		
		Partai Golkar	Partai PDIP	Partai Demokrat
1.	Pemilu 1999	23.741.749	35.689.073	-
2.	Pemilu 2004	24.641.104	20.710.006	8.437.868
3.	Pemilu 2009	14.031.497	14.576.388	21.655.295
4.	Pemilu 2014	18.432.216	23.681.233	12.728.950
5.	Pemilu 2019	17.229.789	27.053.961	10.876.507

Sumber : Diperoleh dari berbagai sumber.

Mencermati hasil pemilu seperti pada table 2 diatas menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar bersifat fluktuatif. Artinya Partai Golkar kemudian tidak memiliki dukungan masyarakat secara konsisten sebagaimana pada pemilu-pemilu selama orde baru. Pada pemilu 1999, Partai

Golkar memperoleh 23.741.749 suara dengan posisi peringkat kedua setelah Partai PDIP. Sedangkan pada pemilu 2004, Partai Golkar memperoleh 24.641.104 suara sebagai pemenang pemilu dengan nominal capaian 899.355 suara, diikuti Partai PDIP 20.710.006 suara dan Partai Demokrat 8.437.868 suara. Lantas pada pemilu 2009, Partai Golkar memperoleh 14.031.497 suara dengan nominal berkurang sebesar 10.609.607 suara, tampil sebagai pemenang pemilu adalah Partai Demokrat 21.655.295 suara dan posisi kedua ditempati oleh Partai PDIP yaitu 14.576.388 suara. Pemilu 2014, Partai Golkar urutan kedua : 18.432.216 setelah PDIP 23.681.233 dan Pemilu 2019 menunjukkan hasil yaitu Partai Golkar memperoleh 17.229.789 dimana kondisi hasil pemilu pada era reformasi tidak begitu stabil bila dibandingkan dengan kondisi hasil pemilu pada pemilu-pemilu orde baru yang sangat stabil atau memenangi pemilu-pemilu secara mutlak.

Partai Golkar dalam perolehan suara secara lokal juga mengalami kondisi yang hampir sama yakni adanya fluktuasi dukungan masyarakat sebagaimana tergambar pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 : Hasil Pemilu Daerah Tahun 2004-2019

No	Pemilu	Hasil Pemilu		
		Partai Golkar	Partai PDIP	Partai Demokrat
1.	Pemilu 2004	758.869	396.619	83.281
2.	Pemilu 2009	361.418	236.639	310.027
3.	Pemilu 2014	425.126	403.821	316.010
4.	Pemilu 2019	363.016	446.136	197.651

Sumber : Diperoleh dari berbagai sumber.

Partai Golkar menunjukkan hasil secara lokal terutama di Propinsi Nusa Tenggara Timur bahwa adanya kecenderungan menurun hasilnya bila dibandingkan pemilu 2004 dan pemilu 2009. Pada pemilu 2004, Partai Golkar memperoleh 758.869 suara sedangkan pada pemilu 2009, Partai Golkar memperoleh 361.418 suara. Mencermati perolehan suara pemilu 2004 dan pemilu 2009 maka Partai Golkar mengalami kondisi kurang cukup signifikan sebesar 397.451 suara. Pada Pemilu 2014, Partai Golkar memperoleh 363.016, dimana jumlah suara ini menurun dibandingkan pada pemilu 2014 yaitu 425.126. Perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2019 juga menurun menjadi 363.016.

Gambaran perolehan suara Partai Golkar dari mulai pemilu tahun 1999 hingga 2019 diatas, memperlihatkan konsistensi Partai Golkar dalam meraih suara, meskipun fluktuatif namun tidak terlalu signifikan, yang berbeda dengan partai lain yang tingkat fluktuatifnya sangat tinggi. Hal ini kemudian yang disebut Mainwaring dan Scully (1995) sebagai partai politik yang terlembagakan terutama pada derajat kesisteman dan derajat pengetahuan publik dengan ruang dukungan yang cukup tersedia dengan konsisten mendapatkan raihan suara sehingga tidak mudah terlempar dan tersisih dari satu pemilu ke pemilu lain. Pada pemilu tahun 2019 di Nusa Tenggara Timur, Partai Golkar meraih perolehan suara cukup signifikan setelah partai Nasdem dan PDIP yaitu perolehan suara mulai dari jumlah 12. 402 di Kabupaten Manggarai Barat sampai jumlah suara paling banyak: 29.286 di Kabupaten Sumba Barat,

perolehan suara dalam rentang diatas tersebar pada 11 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.

Pemilu Tahun 2019 di Nusa Tenggara Timur dengan perolehan suara pada 11 kabupaten/kota yaitu: 1). Kabupaten Manggarai Barat : 12.403, 2). Kabupaten Timor Tengah Utara : 12.521, 3). Kabupaten Sumba Barat Daya : 13.622, 4). Kabupaten Ende : 13.755, 5). Kabupaten Manggarai: 17.364, 6). Kabupaten Sikka : 17.708, 7). Kabuptaen Timor Tengah Selatan : 18.861, 8). Kota Kupang : 19. 227, 9). Kabupaten Kupang : 20.210, 10). Kabupaten Malaka : 24.341, 11). Kabupaten Sumba Barat : 29. 286.

KESIMPULAN

1. Pelembagaan atau institusionalisasi melihat pada bagaimana partai politik tersebut bisa bertahan dari pemilu satu ke pemilu lainnya dengan cara mendapatkan legitimasi dan dukungan suara rakyat. Konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur dapat ditentukan oleh kinerja ekonomi daan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil-militer dan pelembagaan partai politik, pelembagaan Partai Golkar ditunjukkan melalui derajat kesisteman dan derajat pengetahuan publik atau citra publik (*reification*).
2. Pelembagaan dalam hal derajat kesisteman, Partai Golkar melakukan pengambilan keputusan termasuk dalam sistem seleksi calon pemimpin baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dengan mendasarkan diri pada AD/ART Partai Golkar namun penentuan calon gubernur periode 2018-

2023 lebih didominasi oleh pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sementara Dewan Pimpinan Daerah tidak cukup berperan dalam penentuan Gubernur dari Partai Golkar. Meski demikian dalam kajian ini yang menjadi penekanan adalah pendasaran konstitusi partai dalam pengambilan keputusan.

3. Pelembagaan dalam derajat pengetahuan publik, Partai Golkar juga membangun pengetahuan publik dimana adanya ruang dukungan utama terutama di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah yang cukup signifikan tersebar pada 11 kabupaten/kota dari 22 kabupaten/kota setelah perolehan suara signifikan partai Nasdem dan PDIP.
4. Partai Golkar cukup menaati konstitusinya dalam pengambilan keputusan menyangkut rekrutmen maupun rotasi kepemimpinan dan cukup stabil ruang dukungan maka penting penelitian lanjutan berkaitan dengan Manajemen dalam perspektif organisasi modern.

SARAN

1. Partai Golkar perlu secara konsisten menaati ketentuan AD/ART Partai Golkar terutama berkaitan dengan kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan dan mempertimbangkan usulan Dewan Pimpinan Daerah menyangkut calon pemimpin termasuk calon gubernur sehingga mendapat dukungan seluruh anggota dan bekerja secara efisien dan efektif termasuk masyarakat.
2. Partai Golkar juga perlu melakukan pengelolaan ruang dukungan masyarakat sebagaimana dikatakan Huntington tentang

kapasitas kelembagaan partai politik. Artinya bahwa Partai Golkar membentuk ruang dukungan yang utama di masyarakat dan diikuti dengan program partai yang *continue* dan memaksimalkan wilayah dukungan kabupaten/kota yang perolehan suaranya cukup signifikan dan memperluas lagi ke kabupaten yg belum mencapai perolehan suara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adlini, Miza Nina dkk. 2022. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul. Vol. 6 No. 1 Maret 2022. ISSN Online 2580-0469 Halaman 974-980
- [2] Huntington, Samuel P. 1983. Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jakarta: CV. Raja Wali.
- [3] Mainwaring, Scott and Mariano Torcal. 2006. Hand Book of Party Politics, Party System Institutionalization And Party System Theory After The Third Wave of Democratization. Editor oleh Katz, Richard S. dan William Grotty. London: Sage Publication.
- [5] Randall, Vicky and Lars Svasand. 2002. Institutionalization in New Democracies. London: Sage Publication. Vol. 8 Issue 1, January 2002. ISSN 1354-0688 (200201) pp. 5-29
- [6] Ridha TR, Muhammad. 2016. Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal : Fenomena Politik Klan, Cosmogov, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, April 2016. ISSN Online 2540-8674 Halaman 160-182
- [7] Tanjung, Akbar. 2007. Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi antara Tantangan dan Respon. Disertasi.

Jurnal Poros Politik
ISSN : 2528-0953

[8] Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI Tahun 2014

[9] AD/ART Partai Golongan Karya 2019

[10]<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/hitung-suara/>

[11]<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1169/perolehan-suara-dan-kursi-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-partai-politik-hasil-pemilu-tahun2009-2014>

[12][htmlhttps://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf)